



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Forum Rektor yang tergabung dalam Asosiasi LPTKNI; 1. Rektor Universitas Negeri Padang 2. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 3. Rektor Universitas Negeri Manado 4. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Bali
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Mei 2021
Pukul	: 09.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM. (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: 1. Masukan dan evaluasi proses pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN 2. Basis data GTK Honorer, asal sekolah dan sertifikasi pendidik
Hadir Komisi X DPR RI	: 18 orang dari 30 orang anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Prof. Ganefri, Ph.D, Rektor Universitas Negeri Padang 2. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.,AIFO, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 3. Prof. Dr. Deitje. A. Katuuk,Ph.D, Rektor Universitas Negeri Manado 4. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE.,Ak,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Bali

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, Ss., MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Narasumber yang hadir; Prof, Ganefri, Ph.D, Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO, Prof. Dr. Deitje. A. Katuuk, Ph.D, dan Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., Ak, M.Si yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN antara lain:

1. Prof, Ganefri, Ph.D, Rektor Universitas Negeri Padang, menyampaikan pandangan antara lain;
 - a. Guru honorer di Indonesia selalu identik dengan isu kesejahteraan, eksploitasi dan ketidakadilan serta HAM
 - b. Disparitas kualitas guru honorer: kualitas guru < 35 tahun cukup bagus dan latar belakang kualitas LPTK tempat pendidikan guru honorer
 - c. Perbedaan kebijakan pada guru honorer di daerah/ antar sekolah: gaji dan kesempatan dll menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial
 - d. Mendorong perlu tetap menjaga komitmen mutu dari guru honorer yang akan direkrut, karena mengingat visi ke depan pendidikan di Indonesia seperti yang didesain dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang membutuhkan Standar GTK yang kompeten dan berkualitas di era Revolusi Industri 4.0.
 - e. Mengangkat Tenaga Kependidikan dari GTK honorer, khusus pada tingkat SD
2. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, menyampaikan pandangan antara lain;
 - a. Ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang profesional (*expertise, responsibility, corporateness*) menjadi fundamen untuk terwujudnya SDM yang unggul.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah sangat bagus sekiranya secara terus menerus memberikan apresiasi dan rekognisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan.

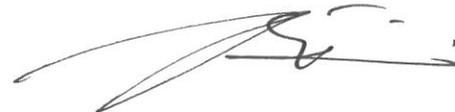
- c. Untuk pemerataan pendapatan akses pendidikan, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) perlu mendapat prioritas.
 - d. Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan memperhatikan 3 aspek secara proporsional; yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.
3. Prof. Dr. Deitje. A. Katuuk, Ph.D, Rektor Universitas Negeri Manado, menyampaikan pandangan antara lain;
- a. Kebijakan penataan GTK honorer hendaknya menjamin bahwa hak konstitusional GTK honorer tetap terjaga dan terpenuhi. Kebijakan penataan GTK honorer tidak boleh mamasung dan membatasi terlebih menghilangkan hak konstitusional GTK honorer untuk mendapatkan pekerjaan bagi kehidupannya, keluarga dan masyarakat.
 - b. Kebijakan penataan GTK honorer haruslah menjamin terpenuhinya standar mutu sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE.,Ak,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Bali, menyampaikan pandangan antara lain;
- a. Dalam rekrutmen PPPK, sistem seleksi juga harus mempertimbangkan masa pengabdian guru honorer, terutama bagi guru honorer yang berprestasi, maka hendaknya pemerintah memberikan prioritas bagi guru honorer dengan tetap mengutamakan mekanisme profesional untuk memperoleh guru yang berkualitas.
 - b. Membangun mekanisme *Talentspool* bagi calon GTK ASN yang diperoleh dari rekrutmen jalur pelamar umum, jalur prestasi atau jalur seleksi internal perguruan tinggi dengan menyediakan formasi sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Memperjelas pasal tentang penyediaan anggaran.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan LPTK diantaranya dengan perbaikan sarana prasarana dan perekrutan calon mahasiswa yang memiliki minat dalam mengajar, sehingga LPTK menjadi sumber perekrutan guru yang berkualitas.

2. mendorong pemerintah memperhatikan kualitas guru secara proporsional dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam melakukan seleksi 1.000.000 (satu juta) guru PPPK.
 3. mendesak pemerintah untuk membuat pemetaan kesiapan anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan program 1.000.000 (satu juta) guru PPPK.
 4. mendorong pemerintah melakukan pengaturan afirmasi yang lebih proporsional dan terperinci (Guru 3T, SLB, PAUD) dalam seleksi 1.000.000 (satu juta) guru PPPK.
 5. mendesak pemerintah menuntaskan program 1.000.000 (satu juta) guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB

KETUA RAPAT,



Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM 